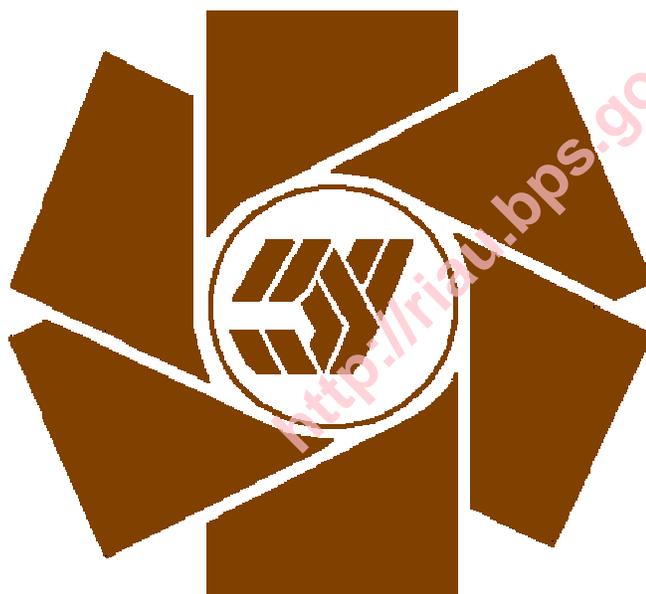


**PENDAPATAN REGIONAL RIAU
MENURUT PENGGUNAAN
2006 - 2010**



PENDAPATAN REGIONAL RIAU MENURUT PENGGUNAAN 2006 - 2010

ISSN : 0126-4796
Nomor publikasi : 14.552.2011.14
Katalog BPS Provinsi Riau : 93 02 004 . 14
Ukuran buku : 21 cm X 28 cm
Jumlah halaman : 49 + vi

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Publikasi Pendapatan Regional Riau menurut Penggunaan tahun 2006 – 2010 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Penyajian publikasi ini ingin memberikan gambaran tentang perkembangan permintaan konsumsi barang dan jasa di wilayah Riau atau permintaan konsumsi barang dan jasa di luar wilayah Riau. Pendapatan Regional Riau menurut Penggunaan mencakup komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor.

Dalam publikasi ini telah diupayakan oleh kami untuk memberikan kemudahan bagi para penggunaan data mulai para eksekutif, legislatif, pebisnis, peneliti hingga kelompok masyarakat lain, untuk memanfaatkannya dengan cara memberikan informasi pertumbuhan ekonomi, dan komposisi atau peran dari setiap komponen yang membentuk Pendapatan Regional menurut Penggunaan, serta indeks implisit dari setiap komponennya untuk informasi perubahan harga barang dan jasa. Pada publikasi ini ditampilkan konsep, definisi, metodologi dan cara penghitungan dari setiap komponen yang membentuk Pendapatan Regional menurut Penggunaan.

Mengingat keterbatasan data dasar yang tersedia, dalam publikasi ini masih ditemui beberapa kekurangan, yang akan terus diupayakan untuk disempurnakan pada publikasi mendatang. Akhirnya, semoga penerbitan publikasi Pendapatan Regional Riau menurut Penggunaan 2006-2010, yang merupakan kerjasama BPS Provinsi Riau dengan Bappeda Provinsi Riau, dapat bermanfaat bagi para pengguna data.

Pekanbaru, Agustus 2011

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
K e p a l a ,

ABDUL MANAF, M
NIP : 195202201976031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Kepala BPS Provinsi Riau	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel Analisis	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel Lampiran	vi
Bab I Pendahuluan	2
1.1 Penjelasan Umum	2
1.2 Cara Penyajian dan Angka Indeks	3
Bab II Komponen-Komponen Penggunaan	6
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	17
2.5 Perubahan Stok/Inventori	21
2.6 Ekspor dan Impor	23
Bab III Perkembangan PDRB Menurut Penggunaan	27
3.1 Perkembangan PDRB Penggunaan	27
3.2 Distribusi PDRB Penggunaan	29
3.2.1 PDRB Penggunaan Tanpa Migas	29
3.2.2 PDRB Penggunaan Dengan Migas	33
3.3 Pertumbuhan PDRB Penggunaan	34
3.3.1 PDRB Penggunaan Tanpa Migas	35
3.3.2 PDRB Penggunaan Dengan Migas	35
3.4 Keterkaitan PMTB Dengan PDRB dan Ekspor	37
Lampiran Tabel-Tabel Pokok	

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel		Halaman
3.1.1	Perkembangan PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Penggunaan, 2000 – 2010 (Miliar Rp.)	28
3.2.1	Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku, 2006 – 2010 (%)	32
3.2.2	Distribusi PDRB Riau Dengan Migas menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku , 2006 – 2010 (%)	34
3.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Riau menurut Penggunaan, 2009 – 2010 (%)	36
3.4.1	Rasio PMTB/Ekspor dan ICOR Riau, 2006 – 2010	38

<http://riau.bps.go.id>

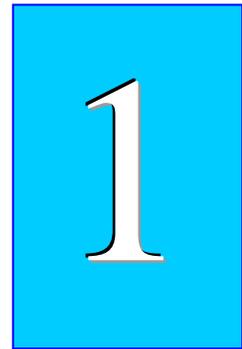
DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
3.1	Nilai PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Penggunaan atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000, tahun 2010 (Miliar Rp.).....	29

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006–2010 (Juta Rp.)	40
2	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006-2010 , (%).....	41
3	Indeks Perkembangan PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006–2010 , (%).....	42
4	Indeks Berantai PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan menurut Penggunaan, 2006–2010 , (%)	43
5	Indeks Implisit PDRB Provinsi Riau Tanpa Migas menurut Penggunaan, 2006–2010	44
6	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006–2010 (Juta Rp.)	45
7	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006–2010, (%)	46
8	Indeks Perkembangan PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006–2010, (%).....	47
9	Indeks Berantai PDRB Provinsi Riau Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan '00 menurut Penggunaan, 2006–2010, (%)	48
10	Indeks Implisit PDRB Provinsi Riau Dengan Migas menurut Penggunaan, 2006–2010.....	49



Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Tingkat kemampuan memproduksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan produksi (*production approach*). Dari angka PDRB ini dapat diketahui sampai pada tingkat (*level*) berapa suatu daerah dapat memproduksi barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, perlu juga untuk mengetahui bagaimana penggunaan atau permintaan masyarakat atau institusi lain dari hasil produksi yang diciptakan tersebut. Pemakaian penyediaan barang dan jasa (*supply*) ini bisa untuk keperluan konsumsi domestik seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi non finansial) atau untuk ekspor bila itu memungkinkan. Komposisi pemanfaatan barang dan jasa seperti disebutkan di atas dapat dilihat pada angka PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*).

PDRB menurut pendekatan pengeluaran atau sering disebut menurut

penggunaan, secara teknis berarti pemanfaatan barang dan jasa untuk konsumsi akhir (*final demand*). PDRB menurut penggunaan merupakan hasil penghitungan dari seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh berbagai golongan masyarakat, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, ekspor, dan impor.

Dengan kata lain, penyajian PDRB menurut penggunaan berarti melihat ekonomi dari sisi permintaan (*demand side*). Permintaan dapat dibedakan menurut permintaan dalam negeri dan luar negeri. Permintaan dalam negeri terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan luar negeri merupakan ekspor barang dan jasa. Oleh karena sebagian permintaan barang dan jasa termasuk barang dan jasa yang berasal dari impor, sehingga untuk melihat permintaan PDRB, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor

akan diperoleh ekspor neto. Selisih permintaan dan penyediaan, termasuk perbedaan statistik (*statistical discrepancy*), yang dicakup dalam perubahan stok.

1.2. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Angka PDRB menurut penggunaan disajikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku yang berarti semua komponen penggunaan dihitung atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun.
- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan tahun 2000, semua komponen penggunaan dihitung atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar 2000. Perubahan penghitungan ke tahun dasar baru, tahun 2000, yang dilakukan sejak tahun 2005 disebabkan antara lain karena adanya peningkatan daya beli masyarakat atas komoditas-komoditas terkini yang muncul akibat peningkatan teknologi atau memang benar-benar komoditas baru. Disamping itu, munculnya komoditas baru karena memang ditunjang oleh perubahan struktur pasokan (*supply*) dari produsen yang semakin bervariasi dalam menghasilkan produknya. Untuk menghitung perkembangan riil PDRB menurut penggunaan dari tahun ke tahun,

digunakan harga konstan 2000 tersebut, melalui indeks berantailah laju pertumbuhan ekonomi setiap komponen dapat diikuti selama periode tertentu.

- c. PDRB menurut penggunaan dapat juga disajikan dalam bentuk kontribusi atau peran masing-masing komponen terhadap total PDRB, yang menggambarkan struktur setiap komponen penggunaan, sehingga mudah untuk mengetahui komposisi komponen penggunaan, mulai dari kontribusi terbesar sampai terkecil. Ini dapat dicermati dari tabel distribusi persentase setiap komponen penggunaan.
- d. Selain itu, melalui angka indeks implisit dapat dilihat perkembangan harga yang terjadi di setiap komponen penggunaan.
- e. Penjelasan tentang cara penghitungan distribusi atau kontribusi, indeks berantai dan indeks implisit adalah sebagai berikut :
 - (1) Kontribusi setiap komponen penggunaan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan diperoleh dari rasio setiap komponen terhadap total PDRB penggunaan dikalikan 100 persen.

(2) Indeks berantai diperoleh dari rasio nilai setiap komponen terhadap nilai komponen yang sama pada tahun sebelumnya yang dikalikan 100. Untuk mendapatkan laju pertumbuhan setiap komponen penggunaan, dengan cara mengurangnya dengan angka 100 dari setiap angka indeks berantai tersebut.

(3) Indeks implisit diperoleh dari rasio nilai masing-masing komponen atas dasar harga berlaku terhadap harga konstan per tahun dikalikan 100. Indeks ini dapat pula menggambarkan besaran tingkat harga secara lebih makro di setiap komponen.

<http://riau.bps.go.id>

2

*Komponen - Komponen
Penggunaan*

BAB II

KOMPONEN-KOMPONEN PENGGUNAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan definisi dari masing-masing komponen PDRB menurut penggunaan, lalu dijelaskan juga tentang metode penghitungan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 serta sumber data yang digunakan.

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

2.1.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru, dikurangi hasil penjualan neto barang bekas atau apkiran pada periode waktu tertentu.

Dalam hal barang-barang yang mempunyai kegunaan ganda, maksudnya bisa untuk keperluan rumah tangga dan juga dapat digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga, maka pembelian dan biaya-biayanya harus dialokasikan

secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi:

- a. Kelompok makanan, minuman, baik dalam bentuk mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan rokok.
- b. Kelompok bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Kelompok perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa rumah atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri.
- d. Kelompok barang yang tahan lama dan perlengkapan rumah tangga.
- e. Kelompok perawatan dokter dan pengeluaran untuk obat-obatan.
- f. Kelompok transpor dan komunikasi.
- g. Kelompok pengeluaran atas peralatan untuk keperluan rekreasi, hiburan, dan jasa sosial lainnya.

- h. Kelompok macam-macam barang dan jasa.

2.1.2. Metode Penghitungan

Metode penghitungan yang biasa dipakai untuk memperkirakan besarnya pengeluaran rumah tangga adalah:

1. Metode langsung yang berdasarkan kepada hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Biaya Hidup (SBH), dan Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR).
2. Metoda tidak langsung melalui pendekatan arus barang, penilaian harga eceran, dan penjualan eceran kepada banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga, tentunya, termasuk rumah tangga elit.
3. Metoda campuran, yaitu gabungan antara metoda langsung dengan metoda penilaian harga eceran atau dengan kata lain data konsumsi dari hasil survei dinilai dengan harga eceran yang dibayar konsumen.

Data konsumsi rumah tangga hasil Susenas masing-masing dinyatakan selama

periode satu minggu untuk kelompok makanan, sementara selama satu bulan untuk kelompok bukan makanan. Untuk keperluan estimasi selama satu tahun digunakan estimasi sebagai berikut:

$$C_{(n+1)} = C_n + [(b)(dp_{(n+1)})(C_n)] \dots \dots (1)$$

di mana :

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan pada tahun $(n + 1)$.

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita sebulan tahun dasar (n) / data SUSENAS.

$dp_{(n+1)}$ = Perubahan pendapatan per kapita harga konstan tahun ke n dengan tahun ke $(n + 1)$.

b = Koefisien elastisitas.

Berdasarkan formulasi tersebut, konsumsi per kapita diasumsikan bergantung kepada besarnya koefisien elastisitas (b) , atau tingkat kecenderungan mengkonsumsi (MPC) suatu jenis komoditas apabila pendapatannya bertambah. Untuk mendapatkan nilai b ini, dipakai analisis regresi silang (*cross section regression analysis*), dengan cara pengeluaran konsumsi per kapita

menurut kelompok pengeluaran diregresikan dengan pendapatan per kapita.

Model garis regresi yang dipakai untuk kelompok makanan pada umumnya berupa fungsi eksponensial, sedangkan untuk bukan makanan menggunakan fungsi linier.

Pada prakteknya ada komoditas yang tidak akan bertambah banyak dikonsumsi, bahkan mungkin berkurang walaupun pendapatan seseorang meningkat. Jenis komoditas ini disebut barang inferior untuk seseorang (misalnya; ketela pohon, jagung dan lain-lain). Jika pendapatan seseorang naik, maka dia cenderung menyubstitusikan komoditas tersebut dengan komoditas lainnya (seperti: terigu, roti, dan lain-lain sejenisnya). Sebaliknya, beberapa komoditas merupakan barang superior, seperti minuman botol, makanan dalam kaleng dan sebagainya. Pada umumnya komoditas ini akan semakin banyak dikonsumsi apabila pendapatan seseorang bertambah.

a. Kelompok Makanan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan besaran koefisien elastisitas (b) digunakan bentuk persamaan/fungsi eksponensial sebagai berikut :

$$Q_i = aY_i^b \dots\dots\dots (2)$$

di mana:

Q_i = Rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum).

Y_i = Pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Untuk menyederhanakan penghitungan persamaan eksponensial tersebut dibuat dalam bentuk linear dengan melogaritmakan :

$$\ln Q_i = \ln (aY_i^b) \dots\dots\dots (3)$$

atau,

$$\ln Q_i = \ln a + b \ln Y_i \dots\dots\dots (4)$$

Sebelum digunakan untuk mengestimasi, nilai koefisien b ini terlebih dahulu diuji untuk meyakinkan apakah ia menunjukkan signifikansi secara statistik. Apabila nilai koefisien b *significant* dan mempunyai nilai koefisien korelasi (r) yang tinggi (mendekati angka 1), maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan konsumsi jenis barang dimaksud.

Setelah nilai koefisien b diperoleh dan nilai keabsahannya dapat diterima, konsumsi pada tahun-tahun lainnya, yang tidak ada surveinya, dapat diperoleh dengan

menggunakan formulasi seperti pada Persamaan (1).

Selanjutnya nilai konsumsi kelompok makanan atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan kuantitas barang tersebut dengan harga rata-rata setiap jenisnya pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Hasilnya dikali 12, untuk mendapatkan angka per tahun, dan dikali lagi dengan penduduk pertengahan tahun untuk mendapatkan total konsumsi penduduk untuk bagian tersebut. Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan tahun 2000, dilakukan dengan cara revaluasi, yaitu kuantum per jenis komoditas barang pada masing-masing tahun yang bersangkutan dikalikan dengan harga konstan tahun 2000, dikali 12, dan selanjutnya dikali lagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

b. Kelompok Bukan Makanan

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok bukan makanan digunakan persamaan/fungsi linier. Untuk mengestimasi konsumsi barang dan jasa dalam kelompok bukan makanan, pendapatan (satuan rupiah) dihubungkan dengan pengeluaran setiap jenis bukan makanan dalam satuan rupiah. Fungsi linier tersebut adalah:

$$Q_i = a + bY_i \dots\dots\dots (5)$$

di mana :

Q_i = Rata-rata konsumsi per kapita sebulan (rupiah)

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Y_i = Pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

Untuk memperkirakan nilai pengeluaran setiap jenis kelompok bukan makanan pada tahun yang tidak mempunyai survei, digunakan formulasi Persamaan (1). Perubahan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan ($dp_{(n+1)}$) dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000, yaitu mendeflasinya dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sesuai dengan jenis barang yang dikonsumsi. Aplikasi formulasi Persamaan (1) menghasilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk mendapatkan nilai konsumsi bukan makanan atas dasar harga berlaku, rata-rata pengeluaran atas dasar harga konstan tersebut di atas pada masing-masing tahun dikalikan dengan IHK sesuai dengan jenis kelompok/subkelompok masing-masing dikali 12,

selanjutnya dikali lagi dengan penduduk pertengahan tahun.

2.1.3. SUMBER DATA

Data perkiraan konsumsi rumah tangga bersumber dari hasil Susenas modul konsumsi, yaitu rata-rata kuantum konsumsi per kapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata rupiah konsumsi per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Di samping itu, digunakan juga data lainnya seperti pendapatan per kapita atas dasar harga konstan yang bersumber dari PDRB sektoral (lapangan usaha). Rata-rata harga eceran dan IHK bersumber dari Statistik Harga Konsumen di perkotaan dan perdesaan. Jumlah penduduk pertengahan tahun bersumber dari publikasi Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dari data proyeksi penduduk.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Seluruh biaya kegiatan

lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Oleh karena itu hampir seluruh aktivitas lembaga dirancang dan dikontrol oleh rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

Ada 5 (lima) karakteristik yang menjadi ciri dari kegiatan Lembaga Non Profit yaitu:

- a. Pada umumnya merupakan lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga.
- c. Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus. *Profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.

e. Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus usaha melalui kegiatan produktifnya, namun surplus usaha yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

2.2.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi lembaga *non profit* meliputi semua pengeluaran atas pembelian atau penerimaan transfer, baik yang berbentuk barang maupun jasa, seperti pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lingkup Lembaga Non Profit yang menjadi fokus pembahasan disini adalah Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu : Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Profesi (Orprof), Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi/, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

2.2.2. Metode Perhitungan

Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, maka nilai pengeluaran konsumsi

LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan kepada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (upah dan gaji, penyusutan barang modal dan pajak tak langsung).

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan input yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metoda langsung dan metoda tidak langsung.

a. Metode Langsung

Dengan metoda ini data diperoleh dengan pencacahan langsung ke LNPRT secara sampel. Nilai yang dimaksud merupakan hasil estimasi rata-rata biaya layanan dari sampel sebagai berikut :

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i} \dots\dots\dots (6)$$

dimana :

- x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke-j dari bentuk LNPRT kode-i
- \bar{x}_i = rata-rata biaya layanan LNPRT kode-i
- n_i = banyaknya sampel LNPRT

Selanjutnya rata-rata biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT per bentuk lembaga, maka diperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi bentuk LNPRT per bentuk lembaga. Nilai estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan penjumlahan nilai pengeluaran konsumsi seluruh bentuk LNPRT.

Sedangkan perhitungan layanan LNPRT atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan bobot IHK untuk masing-masing rincian pengeluaran per bentuk lembaga.

$$m_k = \frac{x_k}{a_k} \dots\dots\dots (7)$$

dimana :

- m_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke- k (adh konstan)

- x_k = biaya layanan rincian pengeluaran ke-k (adh berlaku)
- k = rincian pengeluaran = 1,2,...,n
- a_k = IHK untuk rincian pengeluaran ke-k.

Kemudian estimasi atas dasar harga konstan per bentuk lembaga diakumulasi dengan estimasi atas dasar konstan seluruh lembaga, sehingga didapat estimasi atas dasar harga konstan LNPRT.

b. Metoda Tidak Langsung

Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai pembiayaan) berdasarkan pengeluaran dari lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT. Caranya dengan menghitung besaran pengeluaran unit atau lembaga lain yang menjadi penyumbang (donatur) kegiatan LNPRT tersebut.

Untuk mengukur pertumbuhan riil pengeluaran konsumsi LNPRT dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan berikut :

- i. Metode deflasi yaitu dengan membagi estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT adh berlaku dengan IHK yang sesuai
- ii. Metode rasio pengali tetap atau menaksir penerimaan LNPRT berdasarkan pengeluaran RT, yaitu dengan

mengalikan rasio (tetap = proporsi tahun dasar) terhadap nilai pengeluaran konsumsi RT adh konstan.

$$Y_{LNPRT} = (r\%)(C_{RT}) \dots\dots\dots (8)$$

dimana :

Y_{LNPRT} = pendapatan LNPRT

$r\%$ = proporsi pengeluaran rumah tangga untuk LNPRT

C_{RT} = pengeluaran total konsumsi rumah tangga

Dengan asumsi pendapatan LNPRT sama dengan konsumsi LNPRT, maka :

$$Y_{LNPRT} = (C_{LNPRT}) \dots\dots\dots (9)$$

2.2.3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT diperoleh dari hasil survei khusus. Data tersebut dalam bentuk nilai pengeluaran atas barang dan jasa oleh lembaga serta barang dan jasa dari transfer pihak lain, yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah IHK per kelompok pengeluaran. Data ini digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi LNPRT adh konstan.

Untuk melakukan estimasi pengeluaran konsumsi LNPRT masih

diperlukan data lain, yaitu jumlah populasi LNPRT masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan "listing" ke instansi atau lembaga pembina dari unit LNPRT yang bersangkutan, maupun dengan pengecekan langsung ke lapangan.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

2.3.1. Ruang Lingkup

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non pasar pemerintah. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah :

1. Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari

kegiatan induknya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari tugas pokok dan fungsi lembaga/departemen tersebut dan hasil penjualannya disebut pendapatan dari barang yang dihasilkan.

2. Kegiatan yang bersifat jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, pemerintahan, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai dari keuangan pemerintah, yang keluarannya dijual dengan harga yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut pendapatan dari jasa yang diberikan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan agregasi dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencakup pengeluaran konsumsi semua unit pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota dan pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Komponen ini meliputi seluruh pengeluaran pemerintah di dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terdiri dari:

- a. Pembayaran upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga kerja yang biasanya disebut dengan belanja pegawai.
- b. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai/dikonsumsi termasuk bantuan sosial disebut dengan biaya antara.
- c. Imputasi nilai penyusutan barang-barang modal pemerintah.

Total pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan penjumlahan dari masing-masing jenis pengeluaran tersebut di atas dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa. Penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat yang pada prinsipnya tidak mengambil untung. Data yang tersedia di sini tidak bisa dipisahkan sebagai unit yang berdiri sendiri.

2.3.2. Metode Penghitungan

1. Neraca Produksi Pemerintah

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah, terlebih dahulu harus disusun neraca produksi pemerintah, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah terdiri dari pengeluaran untuk biaya antara

(belanja barang dan bantuan sosial), balas jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar) dan penjualan barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Neraca Produksi Pemerintah

Input	Output
1. Biaya antara (belanja barang dan bantuan sosial) (A)	3. Output (C)
2. Nilai tambah bruto (B)=(B1)+(B2)	3.1. Pengeluaran konsumsi pemerintah (output non pasar) (D)=(C)-(E)
2.1. Penyusutan (B1)	3.2. Penjualan barang dan jasa (E)
2.2. Belanja pegawai (B2)	
Total Input (A)+(B)	Total Output (C)

merupakan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah yang disuplai secara gratis, atau atas dasar harga yang secara ekonomi tidak berarti, kepada institusi lain atau masyarakat.

b. **Biaya antara** adalah pemakaian barang yang tidak tahan lama serta jasa dan bantuan sosial yang digunakan sebagai

a. **Output pemerintah** terdiri dari output pasar dan output non pasar. **Output non pasar** adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah yang dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga dengan konsumsi pemerintah, yaitu barang dan jasa yang digunakan sendiri sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah. Sedangkan output pasar pemerintah

input dalam menghasilkan output pemerintah.

c. **Nilai tambah bruto pemerintah** merupakan penjumlahan dari balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. Balas jasa pegawai merupakan pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan

penyusutan merupakan nilai yang disisihkan sebagai pengganti susut atau ausnya barang modal pemerintah karena dipakai dalam proses produksi.

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga (adh) Berlaku

Nilai konsumsi pemerintah sama dengan total output dikurangi nilai barang dan jasa yang dijual. Sedangkan total input merupakan penjumlahan dari biaya antara dan nilai tambah bruto, jadi nilai pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengurangan total input dengan penjualan barang dan jasa pemerintah.

Untuk pemerintah pusat, data biaya antara dan belanja pegawai didapat dari rincian pengeluaran APBN, sedangkan penjualan barang dan jasa diperoleh dari rincian penerimaan APBN, khususnya pada bagian penerimaan bukan pajak lainnya, yaitu penjualan barang dan jasa dari semua unit pemerintah pusat. Penyusutan diestimasi dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal.

Untuk pemerintah daerah, data biaya antara dan belanja pegawai didapat dari rincian pada sisi pengeluaran APBD (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan desa. Penyusutan diestimasi dengan

menggunakan persentase tertentu terhadap belanja modal. Nilai penjualan barang dan jasa didapat dari rincian pada sisi penerimaan APBD pada bagian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu rincian penerimaan lain-lain. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah jumlah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat pemerintahan yaitu Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia).

Biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah Propinsi mencakup biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Propinsi, ditambah dengan biaya antara, belanja pegawai dan nilai penjualan barang dan jasa pemerintah pusat yang menjadi bagian dari biaya antara, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah Propinsi.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga (adh) Konstan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adh konstan merupakan hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi adh konstan. Biaya antara adh konstan didapat dengan men-*deflate* biaya antara atas dasar

harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tanpa sektor ekspor. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil. Untuk penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

2.3.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan diperoleh dari:

1. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2 dan K3) dari Badan Pusat Statistik.
2. Realisasi APBD dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Jumlah pegawai negeri sipil dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1. Ruang Lingkup

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru

atau bekas dari luar negeri/wilayah, yang dikurangi penjualan neto barang modal bekas digunakan untuk berproduksi di dalam negeri/ wilayah tersebut. Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud (kapital) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi pokok yaitu menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik dan menurut institusi.

1. PMTB menurut jenis barang terdiri dari :
 - i. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti : bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan peralatannya, kendaraan dan ternak
 - ii. Perbaikan besar aset berwujud
 - iii. Biaya transfer kepemilikan aset.

2. PMTB menurut Sektor/Lapangan Usaha

Yang dimaksud adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya.

Sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tertier ini secara rinci terdiri dari : Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas & Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Bank dan Lembaga Keuangan; Pemerintah Umum dan Jasa-jasa.

Rincian PMTB setiap lapangan usaha adalah sebagai berikut :

- i. Sektor pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya.
- ii. Sektor pertambangan terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkutan yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam berproduksi di sektor pertambangan.
- iii. Sektor industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya.
- iv. Sektor listrik, gas dan air bersih mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
- v. Sektor bangunan adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi, termasuk kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor konstruksi.
- vi. Sektor transportasi dan komunikasi yang menjadi PMTB adalah semua kendaraan yang dioperasikan antara lain : bus, truk, sado, beca dan lain-lain, alat angkutan di sungai, laut dan udara,

kereta api termasuk kantor perusahaan jawatan kereta api, pembuatan jalan kereta api, stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan.

vii. Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, real estate dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan, kantor-kantor perwakilan perbankan serta peralatan yang digunakan.

viii. Sektor pemerintahan, barang modal yang dimaksud adalah gedung kantor pemerintahan, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya, semua alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk juga pembuatan jalan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan pembelian barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintahan melainkan masuk pada

pembentukan modal oleh perusahaan penerima sumbangan.

ix. Sektor jasa-jasa berupa gedung bioskop, ternak sirkus atau taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan sebagainya.

2.4.2. Metode Penghitungan

Estimasi penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

a. Pendekatan Secara Langsung

Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Penilaian PMTB adalah atas dasar harga berlaku, yaitu harga barang modal ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan, seperti biaya transport, biaya instalasi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut, termasuk pula biaya bea masuk dan pajak tak langsung.

b. Pendekatan Secara Tidak langsung

Pendekatan secara tidak langsung disebut juga metode arus komoditas (*commodity flow*) atau pendekatan dari sisi penyediaan barang modal.

Pendekatan dengan cara ini membutuhkan ketersediaan data dari sisi penyediaan barang modal (*supply side*), baik dari produksi domestik maupun dari wilayah lain.

Estimasi nilai PMTB dalam bentuk bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu terhadap output sektor konstruksi, baik untuk perhitungan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Estimasi berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan menurut barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Penghitungan berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama mengalokasikan output mesin, angkutan dan barang modal lainnya yang menjadi bagian dari pembentukan modal ditambah biaya angkut dan margin perdagangan, dengan perhitungan tersebut diperoleh estimasi PMTB atas dasar harga berlaku.

Untuk mendapatkan harga konstan, PMTB mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lainnya atas dasar harga berlaku di-deflate dengan IHPB masing-masing jenis barang yang sesuai. Jika data IHPB tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode

ekstrapolasi yaitu dengan mengalikan nilai barang modal pada seri konstan dengan indeks volume masing-masing jenis barang modal. Untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai PMTB harga konstan di-*inflate* dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal.

Estimasi PMTB berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari impor dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, *pertama* dari PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh nilai total barang impor, kemudian untuk merinci menjadi mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya, digunakan alokator barang modal impor dengan kode SITC 3 digit. *Kedua* untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan, PMTB adh berlaku dideflate dengan menggunakan indeks harga yang sesuai sebagai deflatornya.

2.4.3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi PMTB adalah :

- i. Output bangunan
- ii. Nilai barang modal impor
- iii. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan (pendekatan langsung)
- iv. Survei industri besar sedang

- v. Publikasi Statistik Energi untuk sektor listrik, gas dan air bersih.
- vi. Survei Konstruksi
- vii. Hasil survei perusahaan-perusahaan angkutan dan dinas-dinas terkait
- viii. Publikasi PT Kereta Api
- ix. Publikasi PT Pos dan PT Telekomunikasi untuk sektor komunikasi.

2.5. PERUBAHAN STOK/INVENTORI

Komponen perubahan inventori sama pengertiannya dengan perubahan stok yang digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDRB menurut penggunaan. Inventori merupakan persediaan barang jadi maupun setengah jadi pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

2.5.1. Ruang Lingkup

Inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang inventori akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara maupun input akhir.

Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas :

- i. Barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari : perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, dan konstruksi
- ii. Berbagai jenis bahan baku dan penolong, yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- iii. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- iv. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- v. Ternak untuk tujuan dipotong
- vi. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- vii. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan
- viii. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.2. Metode Penghitungan

Pada teori seri penghitungan sebelumnya, perubahan inventori dihitung dengan cara residual atau selisih dari perbedaan antara total PDRB Sektorial dengan total PDRB Penggunaan. Dengan demikian pada komponen ini mencakup perubahan stok/inventori dan diskrepansi statistik. Komponen perubahan inventori satu-satunya komponen penggunaan yang dapat bernilai positif atau negatif. Positif dalam arti terjadi penambahan barang inventori sedangkan negatif apabila terjadi pengurangan barang inventori dari persediaan yang ada.

Untuk menghitung komponen perubahan inventori, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Pendekatan Langsung

Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dari laporan neraca akhir tahun perusahaan dengan series data yang berurutan. Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai posisi inventori pada akhir tahun dikurangkan dengan nilai posisi pada awal tahun pada waktu yang sama. Nilai posisi inventori pada akhir satu tahun selalu merupakan nilai posisi inventori awal pada tahun berikutnya.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung atau disebut juga pendekatan komoditi, dalam prakteknya lebih mudah untuk dilakukan. Data yang dibutuhkan adalah data tentang volume dan harga dari masing-masing barang inventori. Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal barang inventori dikalikan dengan rata-rata harga pembelian, atau rata-rata harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Pertumbuhan riil perubahan inventori dihitung dengan men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan

indeks yang sesuai, bisa menggunakan IHPB yang mewakili indeks implisit PDRB.

Karena keterbatasan data, PDRB Penggunaan Riau masih menggunakan metode lama, yaitu perubahan stok yang merupakan residual dari total PDRB Sektoral dengan total komponen PDRB Penggunaan.

2.5.3. Sumber Data

Sumber data perubahan inventori :

- i. Data komoditi pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian
- ii. Data komoditas perkebunan
- iii. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait
- iv. Indeks harga implisit PDRB sektoral terpilih
- v. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

2.6.1. Ruang Lingkup

1. Ekspor dan Impor Antar Negara

Transaksi perdagangan antar negara dicirikan melalui 2 (dua) aktifitas yang

berlawanan, disebut ekspor apabila produk barang dan jasa dikirim ke luar negeri dan impor apabila produk tersebut masuk ke dalam wilayah ekonomi (domestik).

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi ekonomi penjualan, pertukaran (*barter*), hadiah (*gifts*) atau hibah (*grants*) yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara/wilayah (*region*) dengan non-residen atau pihak luar negeri atau wilayah (*region*) lain. Sedangkan impor merupakan transaksi ekonomi berupa pembelian, pertukaran (*barter*), penerimaan hadiah (*gifts*), hibah (*grants*), berbagai jenis barang dan jasa oleh residen dari non-residen. Konsep residen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara meliputi transaksi ekonomi yang dilakukan antara unit-unit ekonomi negara lain.

2. Ekspor dan Impor Antar Daerah

Panduan resmi tentang pencatatan kegiatan antar daerah di dalam wilayah domestik suatu negara, sehingga pada prakteknya setiap negara mempunyai pendekatan sendiri yang berbeda-beda dalam upaya mengukur jenis transaksi perdagangan yang mendominasi peta ekonomi di setiap daerah di dalam negaranya. Lemahnya sistem administrasi pemerintahan dalam menyusun jenis statistik ini berdampak

terhadap kualitas pengumpulan data transaksi yang sangat berarti dalam konteks mikro atau semi mikro ini.

Pada penyusunan statistik PDRB, kegiatan ini disebut dengan transaksi eksternal antar wilayah yang artinya adalah sistem perdagangan barang dan jasa antar suatu wilayah dengan wilayah-wilayah domestik lainnya (tidak termasuk transaksi dengan luar negeri). Hampir seluruh wilayah di Indonesia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan wilayah-wilayah lainnya. Perbedaan struktur dan aktivitas ekonomi menyebabkan lalulintas perdagangan barang dan jasa menjadi subur dan menjadi kian dominan.

2.6.2. Metode Penghitungan

1. Ekspor dan Impor Antar Negara

Nilai ekspor dan impor berbagai produk barang dan jasa keluar maupun masuk suatu negara (wilayah) adalah jumlah hasil kali antara volume atau kuantum setiap barang dan jasa dengan masing-masing harganya (atas dasar harga berlaku). Harga ekspor barang dinyatakan dalam harga *free on board (fob)*, sedangkan impor barang dinyatakan dalam harga *cost, insurance and freight (cif)*.

Nilai ekspor dan impor dalam standar baku adalah dalam satuan dolar AS, untuk itu perlu dilakukan penyetaraan ke dalam satuan rupiah. Untuk itu diperlukan nilai kurs atau nilai penyetaraan. Kurs nilai dolar AS terhadap rupiah dibedakan untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata kurs beli dolar AS dari Bank Indonesia yang sudah ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor digunakan rata-rata kurs jual dolar AS dari Bank Indonesia yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan.

Untuk mendapatkan harga konstan, nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku di-*deflate* dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU). Indeks IHPU adalah suatu indeks yang sudah mempertimbangkan pengaruh nilai kurs untuk menyajikan nilai ekspor dan impor atas dasar harga konstan dalam rupiah. Sedangkan untuk ekspor impor antar daerah dapat juga digunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Ekspor dan Impor Antar Daerah

a. Metode Langsung

Yaitu dengan melakukan survei khusus arus barang maupun jasa yang keluar

masuk ke dalam suatu daerah. Survei dirancang sesuai dengan jenis barang, asal barang dan tujuan penggunaannya di daerah tersebut.

b. Metode Tidak Langsung

Dengan menggunakan data sekunder dari Direktorat Perdagangan dan Jasa BPS untuk produk barang, sedangkan untuk produk jasa menggunakan data sekunder dari Bank Indonesia.

2.6.3. Sumber Data

1. Ekspor dan Impor Antar Negara

a. Publikasi Statistik Ekspor dan Impor Barang, BPS

b. Neraca Pembayaran BI dan IMF

2. Ekspor dan Impor Antar Daerah

Data sekunder dari pencatatan administrator pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan udara maupun terminal, selain itu jembatan timbang juga bisa menjadi alternatif.

Survei-survei khusus baik yang bersifat pengumpulan data primer maupun data sekunder merupakan pilihan yang relatif lebih baik meskipun implikasinya cukup besar, baik yang berkaitan dengan penyediaan dana, waktu, sumber daya manusia maupun pemilihan responden.

3

Perkembangan PDRB

Menurut Penggunaan

BAB III

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Bab ini menganalisis secara deskriptif tentang PDRB Riau yang ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan (*demand side*). Analisis yang dimaksud adalah analisis perkembangan setiap komponen penggunaan, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan analisis lain seperti : ICOR dan rasio PMTB terhadap ekspor. Analisis dibedakan ke dalam kelompok PDRB penggunaan tanpa migas dan termasuk migas.

3.1. Perkembangan PDRB Penggunaan

Untuk mengamati perkembangan perekonomian suatu daerah, selain melalui perkembangan total PDRB juga dapat diamati dari perkembangan masing-masing komponen penggunaan selama periode tertentu. Dari sini, akan diketahui sampai pada tingkat (*level*) berapa komponen penggunaan tersebut telah dicapai.

Dari Tabel 3.1.1 dapat diamati bahwa secara total PDRB tanpa migas telah terjadi perkembangan yang sangat pesat, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000. Untuk harga berlaku, dari sebesar 22,46 triliun rupiah di tahun 2000, naik 9,55

kali menjadi sebesar 214,55 triliun rupiah pada tahun 2010. Sementara secara riil, atas dasar harga konstan 2000, juga meningkat sebesar 2,17 kali dari 22,46 triliun di tahun 2000 menjadi sebesar 48,64 triliun rupiah pada tahun 2010.

Selanjutnya, bila diamati pada setiap komponen penggunaan tanpa migas atas dasar harga berlaku maka perkembangan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat 11,66 kali dari 2,21 triliun rupiah di tahun 2000 menjadi 25,77 triliun rupiah pada tahun 2010. Sedangkan komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,40 kali, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 9,57 kali, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,97 kali, ekspor sebesar 5,40 kali dan impor sebesar 4,59 kali.

Sedangkan ditinjau dari PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2000, urutan perkembangan per komponen penggunaan dari tahun 2000 ke 2010 adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 3,54 kali, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 2,56 kali, impor sebesar 2,55

kali, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,49 kali, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,90 kali dan ekspor sebesar 1,51 kali.

Dengan memasukkan unsur migas ke dalam perhitungan PDRB Riau, secara total PDRB atas dasar harga berlaku telah terjadi kenaikan sebesar 4,92 kali di tahun 2010 dibanding tahun 2000, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan hanya sebesar 1,40 kali pada tahun 2010. Lebih jauh lagi, perkembangan beberapa komponen yang terkait dengan unsur migas PDRB penggunaan seperti pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor, selama

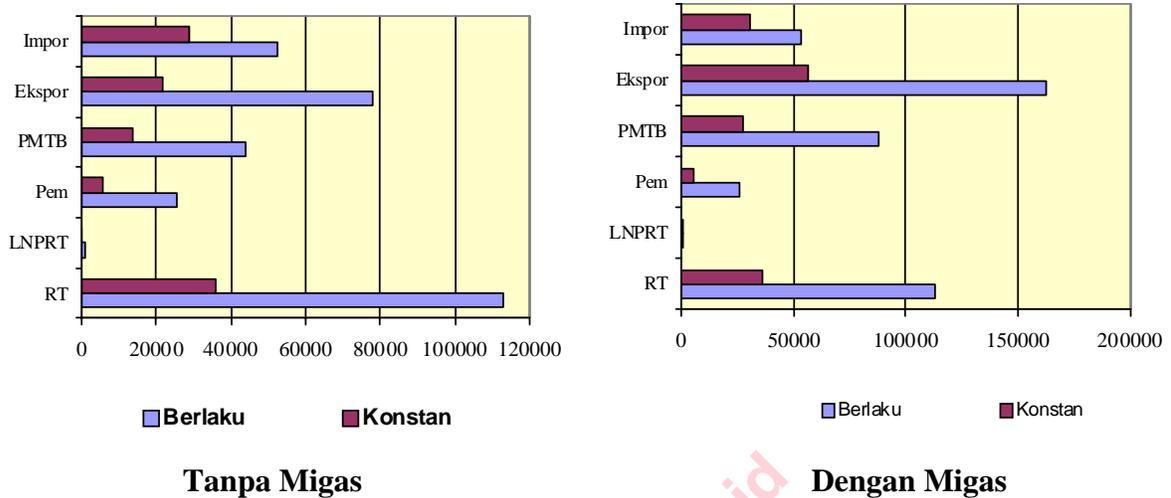
periode 2000-2010 juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Untuk komponen pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga berlaku telah terjadi kenaikan sebesar 7,04 kali di tahun 2010, sementara atas dasar harga konstan 2000 hanya naik sebesar 2,17 kali pada tahun yang sama. Selanjutnya pada tahun yang sama, komponen ekspor atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 4,08 kali, sementara atas dasar harga konstan 2000 meningkat sebesar 1,41 kali. Sedangkan pada komponen impor, atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 4,56 kali, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar 2,58 kali.

Tabel 3.1.1.
Perkembangan PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Penggunaan, 2000-2010
(Miliar Rp)

Komponen Penggunaan	Tanpa Migas			Dengan Migas		
	2000	2010	2010*)	2000	2010	2010*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.887	112.830	35.892	18.887	112.830	35.892
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	104	996	266	104	996	266
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.210	25.774	5.510	2.210	25.774	5.510
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.850	43.905	13.614	12.529	88.138	27.188
5. Perubahan Stok (residual)	-5.630	5.534	531	7.763	6.104	2.947
6. Ekspor	14.437	77.904	21.870	39.828	162.419	56.188
7. Impor	11.402	52.390	29.042	11.744	53.570	30.289
Total PDRB	22.456	214.553	48.642	69.577	342.691	97.702

*) Atas Dasar Harga Konstan 2000

Grafik 3.1.
 Nilai PDRB Riau Tanpa dan Dengan Migas menurut Penggunaan
 atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000, 2010
 (Miliar Rp)



3.2. Distribusi PDRB Penggunaan

Analisis distribusi dari setiap komponen PDRB menurut penggunaan dapat menunjukkan gambaran seberapa besar suatu komponen penggunaan mampu menyumbang terhadap pemanfaatan barang dan jasa, atau dengan kata lain dapat memperlihatkan komposisi setiap komponen penggunaan di dalam perekonomian Riau. Sehingga informasi ini dapat bermanfaat bagi perencana dan pembuat kebijakan di tingkat eksekutif guna memacu perkembangan setiap komponen penggunaan tersebut.

3.2.1. PDRB Penggunaan tanpa Migas

Seperti terlihat pada Tabel 3.2.1. bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen yang dominan dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB penggunaan Riau tanpa migas selama periode 2006-2010. Artinya, bahwa perekonomian Riau masih digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, bila terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat Riau maka akan berdampak luas terhadap perekonomian Riau.

Kemudian komponen penggunaan lain yang termasuk besar dalam memberi kontribusi terhadap perekonomian Riau adalah komponen ekspor yang juga diikuti oleh komponen impor. Ini berarti output barang dan jasa yang dihasilkan oleh Riau telah mampu diekspor dengan memberi peran besar dalam mendapatkan devisa. Namun, kontribusi ekspor ini juga dibarengi oleh kontribusi impor yang besar pula. Ini pertanda bahwa substitusi barang dan jasa tertentu belum sepenuhnya bisa diciptakan di Riau.

Selanjutnya, komponen pembentukan modal tetap bruto atau istilah lain dikenal sebagai investasi non finansial juga cukup besar perannya. Ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan investasinya di Riau relatif besar.

Pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi selanjutnya pada PDRB Riau, dimana sejak otonomisasi daerah dilaksanakan telah meningkat perannya. Peningkatan pada belanja aparatur dan publik menjadi salah satu faktor meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah.

Tabel 3.2.1. memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga cukup mendominasi struktur PDRB Riau menurut penggunaan tanpa migas dengan

kontribusinya mencapai **52,59** persen di tahun 2010. Jika dilihat perkembangan persentase kontribusinya dari tahun 2006 sampai dengan 2010, angka persentase kontribusinya cenderung menunjukkan peningkatan. Hal ini patut menjadi perhatian kita semua untuk menggali segala potensi sumber daya yang ada agar komponen lain dari sisi penggunaan dapat lebih menggerakkan perekonomian Riau, misalkan menggali potensi komoditas unggulan ekspor baru dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik para investor.

Komponen berikutnya adalah ekspor dengan kontribusi sebesar **36,31** persen yang diikuti oleh komponen impor sebesar **24,42** persen di tahun **2010**. Kontribusi ekspor dari tahun 2006 sampai dengan 2010 menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Sedangkan impor berfluktuasi tetapi menunjukkan indikasi penurunan kontribusi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara ekspor dan impor. Untuk komoditas tertentu, ekspor akan meningkat jika bahan bakunya ditambah dengan impor dari luar. Perlu suatu kajian untuk meningkatkan produk bahan baku yang tidak tergantung dari impor. Sehingga kegiatan produksi yang menunjang ekspor tidak terganggu dengan berkurangnya impor. Penggalan komoditas ekspor baru selain kelapa sawit dan CPO-nya, *pulp and paper*,

terus diupayakan agar ekspor non migas Riau lebih bergairah. Selain itu, harga komoditas ekspor non migas agar tetap dijaga stabilitasnya, sehingga para pengusaha yang bergerak pada komoditas tersebut tetap antusias dan optimis pada usahanya.

Ekspor dan impor dapat menjadi ukuran seberapa besar keterbukaan ekonomi suatu daerah terhadap daerah lain termasuk luar negeri, sehingga kedua komponen ini sangat penting untuk dianalisis. Ekspor biasanya disebut sebagai salah satu komponen dari sisi permintaan, sementara impor merupakan komponen dari sisi penawaran. Melalui kedua komponen ini dapat diketahui apakah suatu daerah mengalami surplus atau defisit, yang dapat dilihat dari neraca perdagangannya. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila nilai ekspor lebih besar dari impor, sementara dikatakan defisit apabila terjadi sebaliknya.

Dalam kontribusinya terhadap PDRB Riau tanpa migas, ekspor neto pada tahun 2010, mengalami surplus sebesar 11,89 persen. Ekspor neto dapat dikatakan relatif stabil setiap tahunnya, dari tahun 2006 hingga 2010 memberi tanda bahwa kondisi ekspor Riau masih relatif stabil dalam mengimbangi masuknya barang dan jasa ke Riau. Walaupun jika diamati lebih cermat,

ekspor neto Riau dari tahun 2006 ke 2010 persentasenya cenderung semakin mengecil.

Pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi yang semakin besar di tahun 2010 yaitu sebesar 20,46 persen. Berbagai proyek kegiatan pembangunan fisik di setiap daerah Provinsi Riau terus berlanjut dan menunjukkan perkembangan yang nyata. Pembangunan ini tidak saja berupa pembukaan lahan atau daerah baru yang cukup marak di Riau, juga pembangunan jalan, jembatan, pelebaran pelabuhan udara Sultan Syarif Kasim II, ikon-ikon Riau berupa tugu, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal serta infrastruktur lain seperti sarana dan prasarana untuk PON di Riau yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 telah berjalan dengan baik dan terus berlanjut menuju Riau maju dan sejahtera.

Komponen konsumsi pemerintah berkontribusi sekitar 12,01 persen pada 2010. Kontribusi komponen ini dari tahun 2006 ke tahun 2010 menunjukkan kestabilannya yaitu berkisar 12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah menjadi cukup penting di dalam mengonsumsi (*final demand*) produksi yang tersedia di Riau. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terus meningkat terutama pada belanja pegawai dan penyusutan belanja modal memberi dampak "Multiplier

Effect” bagi perekonomian Riau secara umum.

Sementara komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba dari tahun ke tahun relatif kecil hanya berkisar antara 0,44 persen sampai dengan 0,50 persen dan pada tahun 2010 mencapai **0,46** persen. Kontribusi komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba relatif kecil dan kontribusinya fluktuatif. Dengan kontribusi yang kecil, sebaiknya perlu untuk memacu perkembangan berbagai organisasi, baik

organisasi masyarakat, organisasi budaya maupun sejenisnya, guna mendorong masyarakat berpartisipasi lebih aktif lagi di dalam pembangunan ekonomi.

Sesungguhnya, lembaga-lembaga masyarakat semacam ini dapat membantu pembangunan ekonomi Riau untuk segera mewujudkan Visi Riau 2020, dengan perkataan lain, tidak saja aspek ekonomi yang meningkat tetapi aspek sosial harus turut bersinergi dalam memutar roda pembangunan daerah.

Tabel 3.2.1
Distribusi PDRB Riau Tanpa Migas menurut Penggunaan
atas Dasar Harga Berlaku, 2006-2010
(%)

Komponen Penggunaan	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	48,91	48,62	50,54	50,92	52,59
2. Pengeluaran Konsumsi LN PRT	0,50	0,49	0,44	0,49	0,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,37	13,22	12,26	12,23	12,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,10	19,53	20,26	20,08	20,46
5. Perubahan Stok (Residual)	4,52	5,48	5,32	2,62	2,58
6. Ekspor	45,73	43,07	45,42	37,94	36,31
7. Impor	32,11	30,40	34,24	24,29	24,42
Total PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total PDRB (Miliar Rp)	94.816	117.035	149.125	179.037	214.553

Sumber: BPS Provinsi Riau

3.2.2. PDRB Penggunaan dengan Migas

Dengan memasukkan unsur migas ke dalam perhitungan PDRB Penggunaan Riau menyebabkan komposisi beberapa komponen penggunaan mengalami perubahan. Misalnya di tahun 2009, pengeluaran konsumsi rumah tangga, bila sebelumnya berada di urutan pertama, dengan adanya unsur migas konsumsi rumah tangga menjadi menempati urutan kedua terbesar, sedangkan urutan pertama ditempati oleh komponen ekspor.

Porsi masing-masing komponen penggunaan PDRB Riau dengan migas selama periode 2006-2010 ditampilkan pada Tabel 3.2.2.

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa porsi ekspor selalu menempati urutan pertama selama periode tersebut. Kontribusi ekspor dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berfluktuasi tetapi tetap pada kisaran 47,40 sampai dengan 60,45 persen. Sedangkan ekspor neto cenderung stabil berada pada kisaran 31,77 persen dan 42,95 persen.

Sementara itu kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga berfluktuasi namun cenderung stabil, yakni berada pada kisaran 27,10 persen dan 32,92 persen. Hal ini berarti, di satu sisi terdapat kelompok masyarakat dengan penggunaan

pendapatannya lebih untuk keperluan makanan, tetapi di sisi lain terdapat juga kelompok masyarakat dengan penggunaan pendapatannya lebih untuk keperluan non makanan.

Selanjutnya, pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi sebesar 25,72 persen pada 2010. Selama periode 2006-2008 tampak bahwa kontribusinya cenderung menurun, tetapi mengalami meningkat pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perkembangan investasi fisik di beberapa sektor seperti perkebunan, perikanan, perdagangan dan untuk kegiatan eksplorasi migas yang diperkirakan masih memakai peralatan dan perlengkapan produksi yang lama dan hanya melakukan perbaikan-perbaikan terbatas. Sedangkan pada tahun 2009, telah dilakukan upaya peningkatan investasi untuk peningkatan eksplorasi migas yang produksinya terus menurun. Selain itu, PMTB di sektor non migas mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga gabungan keduanya menyebabkan kontribusi PMTB dengan migas mengalami peningkatan.

Komponen lain seperti konsumsi pemerintah memiliki kontribusi yang cende-

rung stabil selama periode 2006-2010, yakni berkisar antara 6,61 persen sampai dengan 7,52 persen. Hal ini disebabkan nilai PAD yang cukup besar sehingga tersedia cukup

dana untuk pembiayaan belanja aparatur, belanja barang dan penyusutan belanja modal.

Tabel 3.2.2
Distribusi PDRB Riau Dengan Migas menurut Penggunaan
atas Dasar Harga Berlaku, 2006-2010
(%)

Komponen Penggunaan	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27,82	27,10	27,27	30,68	32,92
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,28	0,27	0,24	0,29	0,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,02	7,37	6,61	7,37	7,52
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	23,46	23,01	22,24	24,50	25,72
5. Perubahan Stok (residual)	4,82	5,14	0,70	2,60	1,78
6. Ekspor	55,72	54,99	60,45	50,08	47,40
7. Impor	19,12	17,88	17,50	15,53	15,63
Total PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total PDRB (Miliar Rp)	167.068	210.003	276.400	297.173	342.691

Sumber : BPS Provinsi Riau

Konsumsi lembaga swasta nirlaba memiliki kontribusi yang sangat kecil yaitu dibawah satu persen dan cenderung menurun periode 2006-2008, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan. Kontribusi konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 0,29 persen pada 2009 dan 2010, nilai ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan adanya Pemilu, Pilpres dan PemiluKada di beberapa Kabupaten/Kota. Akan tetapi dengan porsi di bawah satu

persen rasanya perlu untuk lebih memperhatikan lembaga ini sehingga partisipasi dan peran pembangunan daerah dari lembaga ini ikut memberi arti.

3.3. Pertumbuhan PDRB Penggunaan

Kinerja setiap komponen PDRB menurut penggunaan perlu diamati untuk mengetahui komponen mana saja yang memiliki laju pertumbuhan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan mengetahui hal ini, akan dapat dicermati komponen yang

memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Riau, sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pembuat keputusan dan *stakeholders* bisa berjalan secara efektif dan efisien menuju tingkat pencapaian yang diinginkan oleh Visi Riau 2020.

3.3.1. PDRB Penggunaan Tanpa Migas

Mengamati Tabel 3.3.1 terlihat bahwa dari sisi permintaan (*demand side*) laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada tahun 2010 tumbuh sebesar 7,16 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB sebesar 14,18 persen, diikuti oleh komponen impor sebesar 8,43 persen dan pengeluaran komponen rumah tangga sebesar 8,23 persen. Komponen ekspor tumbuh sebesar 4,00 persen, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,70 persen, dan terkecil adalah pengeluaran konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba minus 1,30 persen. Dengan kondisi pertumbuhan tiga terbesar oleh komponen PMTB, impor dan pengeluaran konsumsi rumahtangga, mampu mendorong roda perekonomian Riau. Tetapi hal tersebut perlu mendapat perhatian, karena dengan meningkatnya

PMTB, impor Riau juga tinggi. Hal ini berarti Riau tergantung dengan daerah luar untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Selain itu, menurut PDRB penggunaan kontribusi impor merupakan pengurang.

3.3.2. PDRB Penggunaan Dengan Migas

Masih mengacu ke Tabel 3.3.1, apabila unsur migas dimasukkan ke dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan akan terlihat bahwa laju pertumbuhan menjadi berbeda namun tetap menunjukkan angka positif. Laju pertumbuhan PDRB Riau tahun 2010 sebesar 4,17 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, laju pertumbuhan di tahun 2010 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 laju pertumbuhan sebesar 2,97 persen.

Dari ke-3 komponen penggunaan yang mempengaruhi PDRB dengan migas adalah komponen ekspor, jika pada tahun 2009 pertumbuhannya minus 3,78 persen, maka tahun 2010 ini mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Produksi migas dan harga minyak dunia menunjukkan peningkatan, sehingga diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya pertumbuhan ekspor.

Pertumbuhan komponen impor sebesar 8,75 persen, pertumbuhannya

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009. Kegiatan ekspor impor biasanya saling terkait, impor tinggi akan mendorong ekspor tinggi pula.

Sedangkan komponen pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 8,42 persen pada tahun 2010. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, pertumbuhan pada komponen ini menunjukkan sedikit perlambatan, namun tetap diatas 5 persen.

Produksi migas Riau yang cenderung menurun menyebabkan kegiatan eksplorasi terus dilakukan dalam upaya mencari sumber sumur minyak baru disamping penggantian peralatan yang sudah usang dan peningkatan teknologi untuk peningkatan

kapasitas produksi diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya pertumbuhan di komponen pembentukan modal tetap bruto.

Pada tahun 2010, harga minyak dunia cenderung stabil, hal ini tentu saja menyebabkan negara-negara penghasil minyak cenderung berupaya meningkatkan produksinya. Hal ini tentu saja mempengaruhi perekonomian dunia secara global termasuk Indonesia tidak terkecuali Riau, ditambah kebutuhan konsumsi domestik tetap tinggi. Sehingga upaya-upaya tetap dilakukan agar produksi migas tetap stabil, agar kebutuhan domestik terpenuhi dan tersedia cadangan untuk ekspor.

Tabel 3.3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Riau menurut Penggunaan, 2009-2010
(%)

Komponen Penggunaan	Tanpa Migas		Dengan Migas	
	2009	2010	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,25	8,23	8,25	8,23
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	20,24	-1,30	20,24	-1,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,11	1,70	11,11	1,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,89	14,18	9,02	8,42
5. Perubahan Stok (Residual)	-	-	-	-
6. Ekspor	1,83	4,00	-3,78	3,76
7. Impor	4,43	8,43	6,20	8,75
Total PDRB	6,56	7,16	2,97	4,17

Sumber: BPS Provinsi Riau

Impor menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 8,75 persen. Pertumbuhan impor dapat memacu pertumbuhan ekspor.

3.4. Keterkaitan PMTB dengan PDRB dan Ekspor

Keterkaitan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digambarkan dengan ukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan suatu indikator tentang besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output baik secara fisik maupun nominal. Namun dalam praktek, untuk memudahkan penghitungannya dilakukan dalam bentuk nilai yang diukur dengan harga konstan. Ukuran ini merupakan rasio antara pertambahan kapital (PMTB dan perubahan stok) terhadap pertambahan output (PDRB). ICOR sekaligus mencer-

minkan tingkat efisiensi dalam berproduksi. Semakin tinggi nilai ICOR suatu provinsi, semakin tidak efisien provinsi tersebut dalam berproduksi.

Sementara, keterkaitan PMTB dan ekspor yang digambarkan melalui rasio antara PMTB dengan ekspor merupakan gambaran seberapa besar peran investasi untuk menghasilkan ekspor. Semakin besar peran tersebut, semakin berperan PMTB atau investasi dalam meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

ICOR Riau tanpa migas selama periode 2006-2010, seperti pada Tabel 4.1., memperlihatkan bahwa angka ICOR pada tahun 2006 sebesar 3,03 menjadi 3,67 pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakefisiensinya investasi meningkat tetapi tingkat efisiensi masih terjaga dalam batas kewajaran.

Tabel 3.4.1
Rasio PMTB/Ekspor dan ICOR Riau, 2006-2010

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanpa Migas					
1. Rasio PMTB/Ekspor (%)	53,11	54,03	55,45	56,70	62,25
2. ICOR	3,03	3,20	3,31	4,10	3,67
Dengan Migas					
1. Rasio PMTB/Ekspor (%)	39,66	39,74	40,87	46,30	48,39
2. ICOR	4,62	6,93	4,30	8,70	6,31

Sementara nilai ICOR dengan migas tercatat mengalami peningkatan dari 4,62 di tahun 2006 menjadi 6,31 di tahun 2010. Peningkatan angka ICOR pada tahun 2010 memberikan indikasi bahwa investasi yang sudah ditanamkan belum memberikan hasil yang efisien.

Dari sisi lain, rasio PMTB terhadap ekspor tanpa migas selama periode 2006-2010 seperti yang disajikan pada Tabel 3.4.1, menunjukkan persentase yang meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2006 rasio ini tercatat sebesar 53,11 persen, 2007 rasio naik menjadi 54,03 persen, 2008 rasio naik menjadi 55,45 persen, 2009 rasio naik menjadi 56,70 persen dan 2010 rasio naik menjadi 62,25 persen.

Begitu juga rasio PMTB terhadap ekspor dengan migas juga memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 39,66 persen tahun 2006, sebesar 39,74 persen tahun 2007, sebesar 40,87 persen tahun 2008, sebesar 46,30 persen tahun 2009, dan sebesar 48,39 persen tahun 2010.

<http://riau.bps.go.id>



Lampiran Tabel-tabel Pokok

TABEL 1.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010
(Juta Rp)

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	46,370,189.08	56,904,585.46	75,368,701.53	91,172,123.52	112,829,754.64
a. Makanan	15,858,012.87	20,114,220.66	30,993,939.20	37,453,539.61	46,876,544.23
b. Bukan makanan	30,512,176.21	36,790,364.80	44,374,762.33	53,718,583.91	65,953,210.41
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	472,701.46	572,558.20	655,516.45	876,382.60	995,678.22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,726,029.08	15,467,249.82	18,276,369.25	21,902,190.47	25,773,764.25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,053,881.19	22,854,957.41	30,216,366.45	35,954,996.13	43,905,405.56
5. Perubahan Stok	4,283,432.45	6,409,710.54	7,937,813.54	4,698,486.99	5,533,593.42
6. E k s p o r	43,356,869.57	50,402,076.18	67,727,869.34	67,928,553.18	77,904,264.17
a. Antar Negara	40,499,081.66	47,010,531.71	63,467,388.61	62,940,158.80	72,738,573.46
b. Antar Daerah	2,857,787.91	3,391,544.46	4,260,480.73	4,988,394.37	5,165,690.72
7. I m p o r	30,447,501.36	35,576,153.95	51,057,394.37	43,495,410.27	52,389,769.80
a. Antar Negara	13,232,557.89	14,785,641.87	27,771,869.31	17,878,595.63	22,124,199.09
b. Antar Daerah	17,214,943.47	20,790,512.08	23,285,525.06	25,616,814.64	30,265,570.71
J U M L A H	94,815,601.47	117,034,983.66	149,125,242.19	179,037,322.61	214,552,690.46
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	26,411,843.22	28,307,489.38	30,636,067.23	33,163,412.97	35,891,518.13
a. Makanan	9,098,932.88	9,706,381.66	10,463,928.63	11,359,130.78	12,150,031.41
b. Bukan makanan	17,312,910.34	18,601,107.72	20,172,138.60	21,804,282.19	23,741,486.71
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	192,683.50	208,400.88	224,533.41	269,969.26	266,455.48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,216,825.71	4,599,223.66	4,876,876.79	5,418,574.76	5,510,529.78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,615,478.77	10,523,056.54	11,260,941.90	11,924,255.68	13,614,583.80
5. Perubahan Stok	-742,400.43	-343,803.71	596,170.32	371,468.70	531,036.97
6. E k s p o r	17,829,702.64	19,475,229.28	20,650,328.21	21,028,759.20	21,869,525.65
a. Antar Negara	15,714,912.47	17,182,389.49	18,199,929.34	18,604,390.49	19,384,100.52
b. Antar Daerah	2,114,790.17	2,292,839.79	2,450,398.87	2,424,368.71	2,485,425.13
7. I m p o r	21,106,500.29	23,348,835.94	25,647,987.37	26,784,496.67	29,041,812.55
a. Antar Negara	8,541,267.78	9,320,523.06	10,294,057.66	10,518,181.42	11,874,225.52
b. Antar Daerah	12,565,232.51	14,028,312.89	15,353,929.71	16,266,315.25	17,167,587.03
J U M L A H	36,417,633.12	39,420,760.09	42,596,930.48	45,391,943.91	48,641,837.24

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 2.
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010
 (%)

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	48.91	48.62	50.54	50.92	52.59
a. Makanan	16.73	17.19	20.78	20.92	21.85
b. Bukan makanan	32.18	31.44	29.76	30.00	30.74
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.50	0.49	0.44	0.49	0.46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.37	13.22	12.26	12.23	12.01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.10	19.53	20.26	20.08	20.46
5. Perubahan Stok	4.52	5.48	5.32	2.62	2.58
6. E k s p o r	45.73	43.07	45.42	37.94	36.31
a. Antar Negara	42.71	40.17	42.56	35.15	33.90
b. Antar Daerah	3.01	2.90	2.86	2.79	2.41
7. I m p o r	32.11	30.40	34.24	24.29	24.42
a. Antar Negara	13.96	12.63	18.62	9.99	10.31
b. Antar Daerah	18.16	17.76	15.61	14.31	14.11
J U M L A H	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	72.52	71.81	71.92	73.06	73.79
a. Makanan	24.98	24.62	24.56	25.02	24.98
b. Bukan makanan	47.54	47.19	47.36	48.04	48.81
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.53	0.53	0.53	0.59	0.55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.58	11.67	11.45	11.94	11.33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.40	26.69	26.44	26.27	27.99
5. Perubahan Stok	-2.04	-0.87	1.40	0.82	1.09
6. E k s p o r	48.96	49.40	48.48	46.33	44.96
a. Antar Negara	43.15	43.59	42.73	40.99	39.85
b. Antar Daerah	5.81	5.82	5.75	5.34	5.11
7. I m p o r	57.96	59.23	60.21	59.01	59.71
a. Antar Negara	23.45	23.64	24.17	23.17	24.41
b. Antar Daerah	34.50	35.59	36.04	35.84	35.29
J U M L A H	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 3.
INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	245.52	301.30	399.06	482.73	597.41
a. Makanan	249.90	316.97	488.42	590.22	738.71
b. Bukan makanan	243.30	293.36	353.84	428.35	525.90
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	454.12	550.05	629.75	841.94	956.54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	530.59	699.87	826.98	991.05	1,166.23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	494.87	593.59	784.79	933.83	1,140.32
5. Perubahan Stok	-76.08	-113.85	-140.99	-83.45	-98.29
6. E k s p o r	300.32	349.12	469.13	470.52	539.62
a. Antar Negara	301.84	350.37	473.02	469.09	542.11
b. Antar Daerah	280.39	332.76	418.02	489.44	506.83
7. I m p o r	267.04	312.02	447.80	381.48	459.49
a. Antar Negara	175.26	195.83	367.83	236.80	293.03
b. Antar Daerah	446.94	539.77	604.55	665.07	785.77
J U M L A H	422.23	521.18	664.08	797.29	955.44
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	139.84	149.88	162.21	175.59	190.04
a. Makanan	143.39	152.96	164.90	179.00	191.47
b. Bukan makanan	138.05	148.32	160.85	173.87	189.31
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	185.11	200.21	215.71	259.36	255.98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	190.81	208.11	220.67	245.18	249.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	249.74	273.31	292.47	309.70	353.60
5. Perubahan Stok	13.19	6.11	-10.59	-6.60	-9.43
6. E k s p o r	123.50	134.90	143.04	145.66	151.48
a. Antar Negara	117.12	128.06	135.64	138.66	144.47
b. Antar Daerah	207.49	224.96	240.42	237.87	243.86
7. I m p o r	185.11	204.78	224.95	234.91	254.71
a. Antar Negara	113.13	123.45	136.34	139.31	157.27
b. Antar Daerah	326.22	364.21	398.63	422.31	445.71
J U M L A H	162.17	175.55	189.69	202.14	216.61

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 4.
INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	123.92	122.72	132.45	120.97	123.75
a. Makanan	122.34	126.84	154.09	120.84	125.16
b. Bukan makanan	124.76	120.58	120.62	121.06	122.78
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	121.64	121.12	114.49	133.69	113.61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	127.02	131.91	118.16	119.84	117.68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	123.71	119.95	132.21	118.99	122.11
5. Perubahan Stok	108.65	149.64	123.84	59.19	117.77
6. Ekspor	116.73	116.25	134.38	100.30	114.69
a. Antar Negara	116.88	116.08	135.01	99.17	115.57
b. Antar Daerah	114.72	118.68	125.62	117.09	103.55
7. Impor	124.48	116.84	143.52	85.19	120.45
a. Antar Negara	121.82	111.74	187.83	64.38	123.75
b. Antar Daerah	126.60	120.77	112.00	110.01	118.15
J U M L A H	119.92	123.43	127.42	120.06	119.84
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	107.74	107.18	108.23	108.25	108.23
a. Makanan	107.88	106.68	107.80	108.56	106.96
b. Bukan makanan	107.66	107.44	108.45	108.09	108.88
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	111.16	108.16	107.74	120.24	98.70
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	111.66	109.07	106.04	111.11	101.70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	109.40	109.44	107.01	105.89	114.18
5. Perubahan Stok	54.21	46.31	-173.40	62.31	142.96
6. Ekspor	111.31	109.23	106.03	101.83	104.00
a. Antar Negara	111.53	109.34	105.92	102.22	104.19
b. Antar Daerah	109.68	108.42	106.87	98.94	102.52
7. Impor	114.80	110.62	109.85	104.43	108.43
a. Antar Negara	112.05	109.12	110.45	102.18	112.89
b. Antar Daerah	116.74	111.64	109.45	105.94	105.54
J U M L A H	108.66	108.25	108.06	106.56	107.16

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 5.
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TANPA MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	175.57	201.02	246.01	274.92	314.36
a. Makanan	174.28	207.23	296.20	329.72	385.81
b. Bukan makanan	176.24	197.79	219.98	246.37	277.80
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	245.33	274.74	291.95	324.62	373.68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	278.08	336.30	374.76	404.21	467.72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	198.16	217.19	268.33	301.53	322.49
5. Perubahan Stok	-576.97	-1,864.35	1,331.47	1,264.84	1,042.04
6. E k s p o r	243.17	258.80	327.97	323.03	356.22
a. Antar Negara	257.71	273.60	348.72	338.31	375.25
b. Antar Daerah	135.13	147.92	173.87	205.76	207.84
7. I m p o r	144.26	152.37	199.07	162.39	180.39
a. Antar Negara	154.92	158.64	269.79	169.98	186.32
b. Antar Daerah	137.00	148.20	151.66	157.48	176.29
J U M L A H	260.36	296.89	350.08	394.43	441.09

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 6.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010
(Juta Rp)

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	46,474,567.01	56,904,585.46	75,368,701.53	91,172,123.52	112,829,754.64
a. Makanan	15,893,295.26	20,114,220.66	30,993,939.20	37,453,539.61	46,876,544.23
b. Bukan makanan	30,581,271.75	36,790,364.80	44,374,762.33	53,718,583.91	65,953,210.41
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	472,701.46	572,558.20	655,516.45	876,382.60	995,678.22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,726,029.08	15,467,249.82	18,276,369.25	21,902,190.47	25,773,764.25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	39,192,966.16	48,317,377.81	61,464,689.44	72,806,509.76	88,138,093.64
5. Perubahan Stok	8,054,584.96	10,803,269.55	1,926,927.37	7,733,293.89	6,104,598.93
6. E k s p o r	93,095,351.80	115,487,323.91	167,078,232.74	148,820,987.10	162,419,076.86
a. Antar Negara	88,801,309.93	110,184,404.01	152,066,478.51	131,287,244.27	144,005,827.20
b. Antar Daerah	4,294,041.87	5,302,919.91	15,011,754.23	17,533,742.82	18,413,249.66
7. I m p o r	31,948,011.59	37,549,804.45	48,370,306.81	46,138,459.01	53,569,518.01
a. Antar Negara	14,703,256.66	16,621,506.95	23,113,085.20	19,339,362.87	22,672,929.70
b. Antar Daerah	17,244,754.93	20,928,297.50	25,257,221.61	26,799,096.14	30,896,588.31
J U M L A H	167,068,185.83	210,002,560.30	276,400,129.95	297,173,028.31	342,691,448.53
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	26,411,843.22	28,307,489.38	30,636,067.23	33,163,412.97	35,891,518.13
a. Makanan	9,098,932.88	9,706,381.66	10,463,928.63	11,359,130.78	12,150,031.41
b. Bukan makanan	17,312,910.34	18,601,107.72	20,172,138.60	21,804,282.19	23,741,486.71
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	192,683.50	208,400.88	224,533.41	269,969.26	266,455.48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,216,825.71	4,599,223.66	4,876,876.79	5,418,574.76	5,510,529.78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,688,782.48	20,963,554.67	23,002,235.64	25,076,550.00	27,187,628.95
5. Perubahan Stok	5,250,998.32	3,525,234.19	2,289,379.71	3,554,416.21	2,946,786.95
6. E k s p o r	49,640,421.43	52,752,008.55	56,280,719.72	54,154,493.33	56,188,037.96
a. Antar Negara	46,897,788.13	49,876,271.51	53,175,933.68	50,754,097.61	52,666,542.76
b. Antar Daerah	2,742,633.30	2,875,737.04	3,104,786.03	3,400,395.72	3,521,495.20
7. I m p o r	22,030,687.42	24,142,651.86	26,224,430.68	27,851,179.96	30,289,274.05
a. Antar Negara	9,447,093.58	9,965,585.23	10,578,629.34	10,883,235.41	12,413,497.94
b. Antar Daerah	12,583,593.84	14,177,066.64	15,645,801.33	16,967,944.55	17,875,776.12
J U M L A H	83,370,867.24	86,213,259.47	91,085,381.81	93,786,236.58	97,701,683.19

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 7.
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI RIAU TERMASUK
MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010
 (%)

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	27.82	27.10	27.27	30.68	32.92
a. Makanan	9.51	9.58	11.21	12.60	13.68
b. Bukan makanan	18.30	17.52	16.05	18.08	19.25
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.28	0.27	0.24	0.29	0.29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.02	7.37	6.61	7.37	7.52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.46	23.01	22.24	24.50	25.72
5. Perubahan Stok	4.82	5.14	0.70	2.60	1.78
6. E k s p o r	55.72	54.99	60.45	50.08	47.40
a. Antar Negara	53.15	52.47	55.02	44.18	42.02
b. Antar Daerah	2.57	2.53	5.43	5.90	5.37
7. I m p o r	19.12	17.88	17.50	15.53	15.63
a. Antar Negara	8.80	7.91	8.36	6.51	6.62
b. Antar Daerah	10.32	9.97	9.14	9.02	9.02
J U M L A H	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	31.68	32.83	33.63	35.36	36.74
a. Makanan	10.91	11.26	11.49	12.11	12.44
b. Bukan makanan	20.77	21.58	22.15	23.25	24.30
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.23	0.24	0.25	0.29	0.27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.06	5.33	5.35	5.78	5.64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.62	24.32	25.25	26.74	27.83
5. Perubahan Stok	6.30	4.09	2.51	3.79	3.02
6. E k s p o r	59.54	61.19	61.79	57.74	57.51
a. Antar Negara	56.25	57.85	58.38	54.12	53.91
b. Antar Daerah	3.29	3.34	3.41	3.63	3.60
7. I m p o r	26.42	28.00	28.79	29.70	31.00
a. Antar Negara	11.33	11.56	11.61	11.60	12.71
b. Antar Daerah	15.09	16.44	17.18	18.09	18.30
JENIS PENGELUARAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 8.
INDEKS PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010

R I N C I A N	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	246.07	301.30	399.06	482.73	597.41
a. Makanan	250.46	316.97	488.42	590.22	738.71
b. Bukan makanan	243.85	293.36	353.84	428.35	525.90
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	454.12	550.05	629.75	841.94	956.54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	530.59	699.87	826.98	991.05	1,166.23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	312.83	385.66	490.59	581.12	703.49
5. Perubahan Stok	103.75	139.16	24.82	99.61	78.63
6. E k s p o r	233.74	289.96	419.50	373.66	407.80
a. Antar Negara	233.26	289.43	399.45	344.86	378.27
b. Antar Daerah	244.15	301.51	853.54	996.94	1,046.94
7. I m p o r	272.04	319.74	411.88	392.88	456.15
a. Antar Negara	186.54	210.88	293.23	245.36	287.65
b. Antar Daerah	446.56	541.95	654.05	693.97	800.08
J U M L A H	240.12	301.83	397.26	427.11	492.54
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	139.84	149.88	162.21	175.59	190.04
a. Makanan	143.39	152.96	164.90	179.00	191.47
b. Bukan makanan	138.05	148.32	160.85	173.87	189.31
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	185.11	200.21	215.71	259.36	255.98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	190.81	208.11	220.67	245.18	249.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157.15	167.33	183.60	200.15	217.00
5. Perubahan Stok	67.64	45.41	29.49	45.78	37.96
6. E k s p o r	124.64	132.45	141.31	135.97	141.08
a. Antar Negara	123.19	131.01	139.68	133.32	138.34
b. Antar Daerah	155.94	163.51	176.53	193.34	200.23
7. I m p o r	187.59	205.58	223.30	237.16	257.92
a. Antar Negara	119.85	126.43	134.21	138.08	157.49
b. Antar Daerah	325.86	367.12	405.16	439.39	462.90
J U M L A H	119.83	123.91	130.91	134.79	140.42

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 9.
INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	124.20	122.44	132.45	120.97	123.75
a. Makanan	122.61	126.56	154.09	120.84	125.16
b. Bukan makanan	125.04	120.30	120.62	121.06	122.78
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	121.64	121.12	114.49	133.69	113.61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	127.02	131.91	118.16	119.84	117.68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	112.38	123.28	127.21	118.45	121.06
5. Perubahan Stok	1150.30	134.13	17.84	401.33	78.94
6. Ekspor	111.87	124.05	144.67	89.07	109.14
a. Antar Negara	111.86	124.08	138.01	86.34	109.69
b. Antar Daerah	112.02	123.49	283.08	116.80	105.02
7. Impor	119.15	117.53	128.82	95.39	116.11
a. Antar Negara	111.83	113.05	139.06	83.67	117.24
b. Antar Daerah	126.19	121.36	120.68	106.10	115.29
J U M L A H	120.18	125.70	131.62	107.52	115.32
B. Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	107.74	107.18	108.23	108.25	108.23
a. Makanan	107.88	106.68	107.80	108.56	106.96
b. Bukan makanan	107.66	107.44	108.45	108.09	108.88
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	111.16	108.16	107.74	120.24	98.70
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	111.66	109.07	106.04	111.11	101.70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	104.40	106.47	109.72	109.02	108.42
5. Perubahan Stok	119.93	67.13	64.94	155.26	82.90
6. Ekspor	104.38	106.27	106.69	96.22	103.76
a. Antar Negara	104.24	106.35	106.62	95.45	103.77
b. Antar Daerah	106.82	104.85	107.96	109.52	103.56
7. Impor	110.32	109.59	108.62	106.20	108.75
a. Antar Negara	103.12	105.49	106.15	102.88	114.06
b. Antar Daerah	116.41	112.66	110.36	108.45	105.35
J U M L A H	105.15	103.41	105.65	102.97	104.17

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

TABEL 10.
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU
TERMASUK MIGAS MENURUT PENGGUNAAN, 2006-2010

JENIS PENGELUARAN	2006	2007	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	175.96	201.02	246.01	274.92	314.36
a. Makanan	174.67	207.23	296.20	329.72	385.81
b. Bukan makanan	176.64	197.79	219.98	246.37	277.80
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	245.33	274.74	291.95	324.62	373.68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	278.08	336.30	374.76	404.21	467.72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	199.06	230.48	267.21	290.34	324.18
5. Perubahan Stok	153.39	306.46	84.17	217.57	207.16
6. E k s p o r	187.54	218.92	296.87	274.81	289.06
a. Antar Negara	189.35	220.92	285.97	258.67	273.43
b. Antar Daerah	156.57	184.40	483.50	515.64	522.88
7. I m p o r	145.02	155.53	184.45	165.66	176.86
a. Antar Negara	155.64	166.79	218.49	177.70	182.65
b. Antar Daerah	137.04	147.62	161.43	157.94	172.84
J U M L A H	200.39	243.58	303.45	316.86	350.75

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara